

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat

Nurfaizah¹, Amimah Oktarina²

Institut Agama Islam Negeri Sorong¹, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu²

Email : nurfaizah261293@gmail.com¹, amimahoktarina@mail.uinfasbengkulu.ac.id²

Abstract: *Poverty is a complex problem, therefore it is necessary to find solutions to overcome the problem. The aim of this research is to see the influence of economic growth, unemployment, and government spending and special autonomy funds (DOK) on poverty levels. This research is quantitative research using panel data regression. The data used is time series data (2017-2022 period) and cross section data (13 regencies/cities in West Papua Province). The results of this research show; GRDP has an influence on poverty with a negative relationship. The unemployment rate has no influence on poverty. The level of government spending has a significant influence on poverty with a positive relationship. The Special Autonomy Fund (DOK) has no influence on poverty.*

Keywords: *Poverty; Economic Growth; Unemployment; Government Expenditures; and DOK*

Abstrak : Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks, oleh karena itu perlu dicari solusi untuk mengatasi permasalahan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah dan dana otonomi khusus (DOK) terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. data yang digunakan adalah data time series (periode 2017-2022) dan data cross section (13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat). Hasil dari penelitian ini menunjukkan ; PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan arah hubungan negative. Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan positif. Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Pengeluaran Pemerintah; dan DOK

Copyright (c) 2024 Nurfaizah, Amimah Oktarian

A. Pendahuluan

Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, diantaranya minyak, gas alam, pertanian, perikanan, Kelautan, kehutanan, dan pariwisata yang berada di setiap daerah di provinsi Papua Barat diantaranya .

Tabel 1. Kekayaan Sumber Daya Alam Papua Barat

No	Nama Daerah	Kekayaan Alam	
1	Kabupaten Sorong	Industri	KEK Sorong
2	Kota Sorong	Perikanan	Ikan Lemuru, dan Ikan Kembung
3	Kabupaten Tambrauw	Peternakan	Sapi Potong
4	Kabupaten Maybrat	Pariwisata	Danau Ayamaru

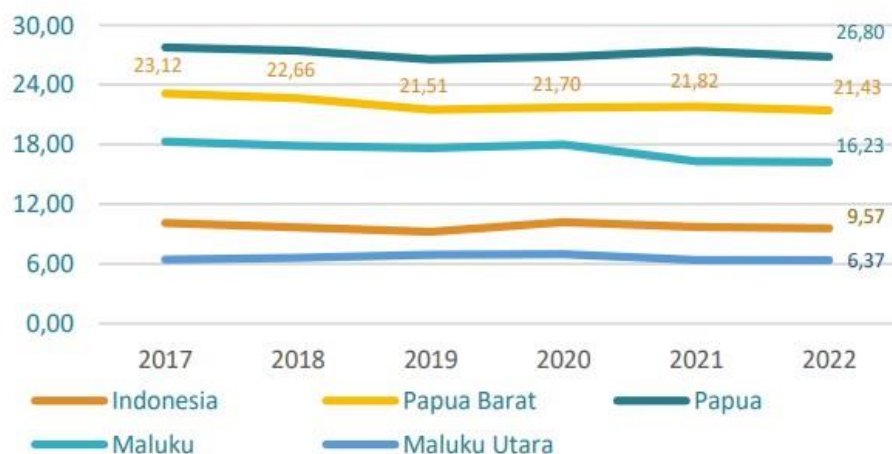
5	Kabupaten Raja Ampat	Pariwisata	Wisata Bahari Geopark
6	Kabupaten sorong Selatan	Perkebunan	Kakao dan Kelapa
7	Kabupaten Teluk Bintuni	Perikanan	Ikan Lemuru, Ikan Selar, Ikan Sikuda,
		Pertambangan	LNG Tanggung dan Genting Oil
8	Kabupaten Fak-fak	Perkebunan	Pala
9	Kabupaten Manokwari	Pertambangan	Kayu bulat, gaharu, rotan
10	Kabupaten pegunungan Arfak	Pariwisata	budaya Suku Arfak, Danau Anggi
11	Kabupaten Teluk Wondama	Perikanan	Budidaya Kerang Mutiara
		Pertambangan	Bahan Galian
12	Kabupaten Kaimana	Pertambangan	Batu Gamping, dan Zikron

Sumber. BPS, 2022

Namun sumber kekayaan yang melimpah belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat asli Papua. Selain memiliki kekayaan alam yang berlimpah Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki status daerah otonomi khusus. Dimana provinsi papua barat mendapatkan insentif dana tambahan dari pemerintah selama 20 tahun kedepan sebesar dua persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2008 Dana otonomi khusus (DOK) merupakan suatu jenis dana yang alokasinya diperuntukkan pada pembiayaan pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan status otonomi khusus, namun mereka masih dihadapkan dengan berbagai tantangan social dan ekonomi yang kompleks salah satunya yaitu kemiskinan, Papua Barat sampai saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan yang tinggi, Berdasarkan data analisis regional tingkat kemiskinan Provinsi papua barat berada pada posisi tertinggi kedua di Indonesia setelah provinsi Papua.

Grafik 1 Tingkat Kemiskinan



Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan data diatas, tingkat kemiskinan di Papua Barat masih sangat tinggi 21,43%, berada di urutan kedua setelah Papua. Angka tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional 9,57%. Kondisi ini juga diperparah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dengan kata lain persentase pengangguran yang cukup tinggi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan Nurkse, daerah yang tertinggal umumnya terperangkap dalam lingkaran

kemiskinan (vicious circle of poverty). Menurut Nurkse, adanya lingkaran kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan permintaan yang rendah. Oleh karena itu, upaya untuk memutus lingkaran kemiskinan harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang besar dan terus bertumbuh akan menghasilkan penambahan tenaga kerja produktif, yang kemudian akan meningkatkan pasar domestik melalui pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, peningkatan angkatan kerja akan menciptakan output produksi yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan pasar domestik yang terus berkembang. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi, seperti Teori Harold Domar, Teori Solow, Big Push Theory, dan Teori Rostow, menyimpulkan bahwa akumulasi modal (termasuk investasi baru), pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi merupakan tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi melalui penyerapan tenaga kerja baik oleh sektor swasta maupun pemerintah, kemajuan teknologi inovatif, dan peningkatan modal manusia diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Sukirno, Pengangguran dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan masyarakat, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang dapat menimbulkan masalah tambahan, seperti kemiskinan.

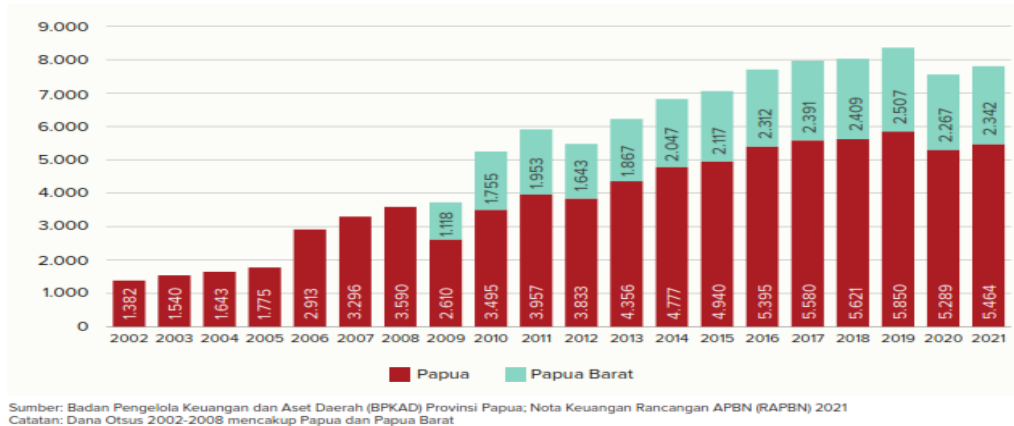
Selain factor pengangguran, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu factor penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan disuatu daerah, karena terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak terhadap banyak sector, diantaranya kemiskinan, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, melainkan juga menjadi syarat yang signifikan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat memiliki potensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan serupa yang mendukung konsep ini disampaikan dalam penelitian oleh Permadi (2018), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam pengurangan tingkat kemiskinan, Seri Jefry Adil Waruwu (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, dengan kata lain indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah PDRB.

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, melalui belanja pemerintah. Dalam konteks ini pelaksanaan pengeluaran pemerintah dapat diwujudkan melalui investasi pemerintah. Menurut Widodo (2011), investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan akan memiliki potensi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia dapat terjadi, dan tingkat kemiskinan dapat diminimalkan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kemiskinan adalah dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus dimanfaatkan untuk pembiayaan disektor Pendidikan, Kesehatan,

infrastruktur, serta kegiatan ekonomi masyarakat OAP, yang tujuannya sebagai bentuk Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat dari kesenjangan dengan daerah lain. Secara umum anggaran DOK provinsi Papua Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2012 dan tahun 2022.

Grafik 2
Anggaran DOK Provinsi Papua Barat



Menurut Parbowo Dana otonomi Khusus merupakan strategi untuk mengatasi masalah kesejahteraan social atau kemiskinan. Enders (2012), menemukan adanya pengaruh antara pemberian otonomi khusus dengan perubahan indeks pembangunan ekonomi. Terjadi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 10% setelah diterapkannya status otonomi khusus. Angka tersebut merupakan penurunan kemiskinan paling signifikan dalam satu dekade terakhir (Yasin, 2022).

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka untuk itu diperlukan kajian untuk mengidentifikasi factor-faktor yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Papua Barat, serta dapat menjadi landasan pengembangan startegi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, sehingga terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder dengan data time series dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dan data Cross Section terdiri dari 13 data kabupaten. Gabungan data dari data time series dan cross section dalam ekonometrika disebut data panel. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Portal Data DJPK Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistitrimak (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yaitu, Manokwari, Manokwari Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Maybrat, Sorong Selatan, Tambrau, Pegunungan Arfak, Fak-fak, Kaimana, dan Raja Ampat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi data panel. Untuk mengistemasi parameter model dengan data panel, ada beberapa Teknik yang ditawarkan yaitu, Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). selanjutnya untuk memilih model regresi Panel dapat dilakukan dengan uji likelihood ratio dan Hausman. selanjutnya untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan pemilihan

model terbaik antara .maka peneliti melakukan Uji koefisien determinasi (R²) dan uji parsial (uji t).

Jenis data pada penelitian ini yaitu data panel yang mana data panel merupakan gabungan data antar ruang dan waktu. Persamaan regresi data panel statis ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (i)$$

Dengan menggunakan gangguan acak yang diasumsikan mengikuti one way error component model sebagai berikut:

$$\varepsilon_{it} = \alpha_i + \mu_{it} \quad (ii)$$

Diasumsikan μ_{it} bahwa merupakan gangguan acak yang tidak berkorelasi dengan X_{it} , sedangkan α_i disebut sebagai efek individual (time invariant person specific effects). Model regresi panel secara umum dan model turunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

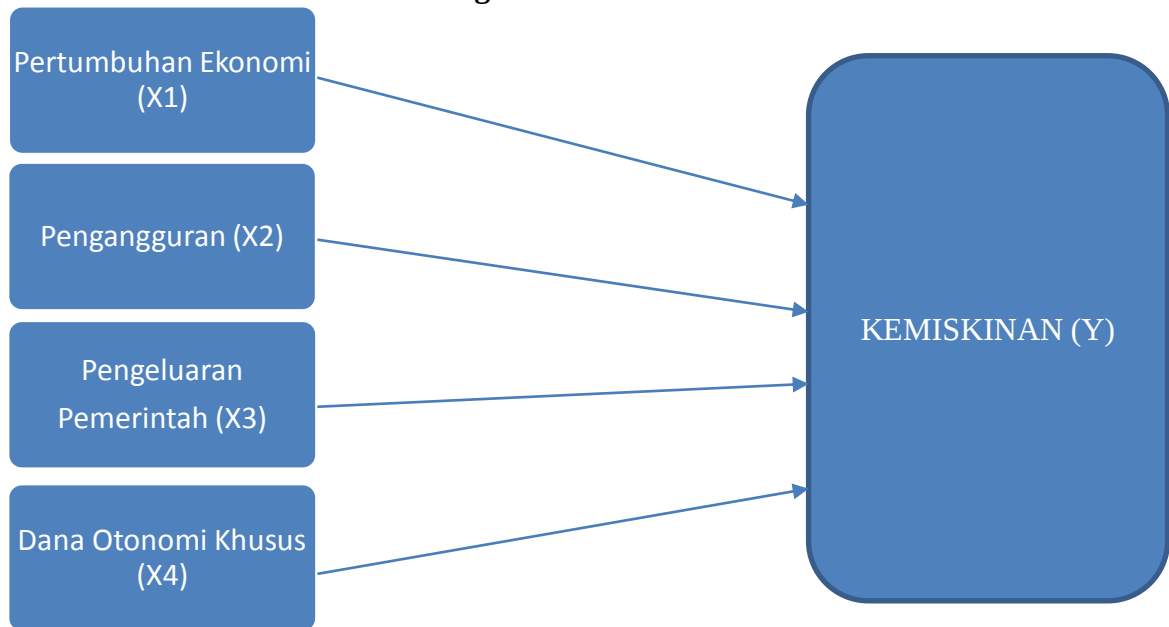
$$Y_{it} = \alpha + \sum \beta_1 X1_{it} + \sum \beta_2 X2_{it} + \sum \beta_3 X3_{it} + \sum \beta_4 X4_{it} + \varepsilon_{it} \quad (iii)$$

Keterangan:

Y	= Variabel Kemiskinan
α	= Konstanta
$\beta_{(1,2, n)}$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
ε	= Error Term
t	= Waktu
i	= Kabupaten
X1	= Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto)
X2	= Variabel Pengangguran (Pengangguran terbuka))
X3	= Variabel Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal)
X4	= Variabel Dana Otonomi Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Berikut kami gambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Bagan 1
Kerangka Pemikiran



Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan, dengan menggunakan indikator persentase kemiskinan pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat. selanjutnya penelitian ini menggunakan 4 variabel independent, yaitu Pertama, Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Kedua, Variabel Pengangguran, indikator yang digunakan adalah persentase jumlah pengangguran terbuka. Ketiga, Pengeluaran Pemerintah. indikator yang digunakan adalah belanja modal. Keempat, Dana Otonomi Khusus (DOK) Provinsi Papua Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 data observasi dalam kurun waktu periode 2017-2022. Jumlah wilayah yang menjadi sampel akhir penelitian berjumlah 13 kabupaten dan kota. Berikut adalah analisis deskriptif dari masing-masing variabel:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Observasi
Kemiskinan	3.214949	3.669442	2.7055380	0.295077	78
PDRB	14.37033	17.06001	11.69987	1.548325	78
Pengangguran	1.198981	2.605648	-2.120264	0.883691	78
Pengeluaran	5.509037	7.176774	4.080922	0.503193	78
Otsus	25.54474	26.05000	24.78000	0.311860	78

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki nilai paling rendah yakni 2.7055 yang menunjukkan Tingkat kemiskinan pada Kota Sorong tahun 2022 sedangkan nilai tertinggi yakni sebesar 3.669 yang dimiliki oleh Pegunungan Arfak pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata variabel kemiskinan ialah 3.2149 dan standar deviasi sebesar 0.2950. Variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB memiliki nilai paling rendah pada periode 2017 di Pegunungan Arfak dengan nilai sebesar 11.6998 sedangkan nilai tertinggi pertumbuhan ekonomi terletak pada periode 2020 di Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai sebesar 17.0600. Nilai rata-rata pada variabel pertumbuhan ekonomi ialah 14.3703 sedangkan nilai standar deviasinya ialah 1.5483.

Variabel pengangguran memiliki nilai terendah pada periode 2022 yang terletak di Pegunugn Arfak dengan nilai -2.1202 sedangkan nilai tertinggi pengangguran terletak pada periode 2017 di Kota Sorong dengan nilai 2.6056. Niali rata-rata pada variabel pengangguran yakni 1.1989 dengan standar deviasi yakni 0.8836. Variabel Tingkat Pengeluaran memiliki nilai terendah sebesar 4.0809 yang terletak pada wilayah Manokwari Selatan pada periode 2022 sedangkan nilai tertinggi ialah 7.1767 yang dimiliki wilayah Teluk Bintuni pada periode 2020. Nilai rata-rata variabel Tingkat Pengeluaran ialah 5.5090 dengan standar deviasi sebesar 0.5031.

Adapun variabel Dana Otonomi Khusus (DOK) memiliki nilai paling rendah pada wilayah Tambaraw tahun 2021 senilai 24.78 sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh wilayah Pegunungan Arfak senilai 26.05 pada tahun 2019. Nilai rata-rata variabel Otsus ialah 25.5447 dengan standar deviasi senilai 0.3118.

2. Pemilihan Model Estimasi

Menemukan model yang tepat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel memerlukan serangkaian proses pengujian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pengujian diantaranya Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan tiga tahap dari tes ini.

Tabel 3
Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM

	Prob.	Keterangan	Kesimpulan
Uji Chow	0.0000	< 0.05 H0 ditolak	FEM
Uji Hausman	0.000	< 0.05 H0 ditolak	FEM

Sumber: Eviews, data diolah, 2024

Hasil uji chow dalam tabel diatas, memperlihatkan nilai *Prob Cross-section F* < (0,05), artinya H_0 ditolak, yang berarti model yang baik digunakan untuk mengestimasi data panel adalah FEM dibandingkan dengan model CEM. Dilanjutkan uji Housman untuk melihat model FEM atau REM yang tepat diaplikasikan dalam regresi data panel. Berdasarkan hasil uji housman pada table 5 menunjukkan nilai *Prob Chi-square* < (0,05) sehingga H_0 ditolak, memperlihatkan bahwa model FEM yang tepat untuk mengestimasi data panel sehingga hasil pengujian berhenti sampai disini. Dari hasil uji Chou dan Housman dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat digunakan daripada CEM dan REM. Apapun yang terpilih baik REM maupun FEM maka pengujian telah selesai dilakukan, dengan demikian maka penelitian ini menggunakan FEM dalam memperkirakan data panel.

3. Hasil Uji Signifikan

a. Uji F (Simultan)

Tabel 4

Uji F

Root MSE	0.037956	R-squared	0.983239
Mean dependent var	3.214949	Adjusted R-squared	0.978843
S.D. dependent var	0.295077	S.E. of regression	0.042921
Akaike info criterion	-3.268858	Sum squared resid	0.112374
Schwarz criterion	-2.755217	Log likelihood	144.4855
Hannan-Quinn criter.	-3.063238	F-statistic	223.6487
Durbin-Watson stat	1.034698	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews, data diolah, 2024

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel independen yang diteliti dapat mempengaruhi variabel dependennya secara sendiri-sendiri atau simultan. Berdasarkan hasil *Fixed Effect Model* (FEM) atau model yang terpilih sebagai model terbaik, terlihat pada nilai probabilitas *F-statistic* pada regresi data panel adalah $0.000000 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen atau dalam hal ini Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel independen yakni PDRB, Pengangguran, Pengeluaran dan Otsus.

b. Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk menyalakan signifikansi parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Pentingnya distribusi data yang mendekati normal harus diperhatikan dalam melakukan uji t. Proses pengujian hipotesis melibatkan pemahaman terhadap distribusi sampel ¹

Tabel 5

Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/02/24 Time: 13:48
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 13

¹ Widarjono A, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (UPP STIM YKPN, 2013).

Total panel (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.18115	1.308182	9.311513	0.0000
X1	-0.612444	0.088708	-6.904042	0.0000
X2	-0.023275	0.011691	-1.990789	0.0510
X3	0.042702	0.017584	2.428499	0.0181
X4	-0.014583	0.017923	-0.813655	0.4190

Sumber: Eviews, data diolah, 2024

Berdasarkan temuan dan hasil regresi data panel dengan menggunakan model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), terdapat 2 variabel yang memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan ialah PDRB (X1) dan Pengangguran (X3).

c. Koefisien Determinan Simultan (R^2)

Tabel 6
Uji Determinasi Simultan (R^2)

Root MSE	0.037956	R-squared	0.983239
Mean dependent var	3.214949	Adjusted R-squared	0.978843
S.D. dependent var	0.295077	S.E. of regression	0.042921
Akaike info criterion	-3.268858	Sum squared resid	0.112374
Schwarz criterion	-2.755217	Log likelihood	144.4855
Hannan-Quinn criter.	-3.063238	F-statistic	223.6487
Durbin-Watson stat	1.034698	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews, data diolah, 2024

Merujuk hasil *Fixed Effect Model* (FEM) yang merupakan model terpilih sebagai model terbaik, terlihat bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.978843 (97%). Hal ini berarti bahwa variabel independen yakni PDRB, Pengangguran, Pengeluaran dan Otsus dapat menjelaskan variabel kemiskinan, sedangkan 3% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

4. Implementasi Hasil Penelitian

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menggunakan data panel dengan model *Fixed Effect Model* yang telah digunakan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan arah hubungan negative. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.0000 < 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Koefisien PDRB yakni -0.612444, yang memiliki arti terdapat hubungan tidak searah diantara kedua variabel. Hal ini berarti kenaikan 1% pada PDRB akan menurunkan sebesar 0.612444% pada tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.

Hal ini sejalan dengan teori Todaro yang mengemukakan bahwa salah satu syarat untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang merata, artinya lebih banyak komoditas atau jasa yang diproduksi secara keseluruhan. Dengan demikian, ekspansi ekonomi semacam ini dapat secara efektif menurunkan kemiskinan. karena pertimbangan diberikan pada kesejahteraan

seluruh lapisan masyarakat. Ekspansi ekonomi berpotensi menciptakan kekayaan, yang pada akhirnya akan menggantikan kemiskinan dan segala permasalahan yang terkait dengannya²

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti Iqbal Salsabil & Westi Rianti (2023), Sabyan & Widyanti (2022) dan Siadari & Damanik (2023) yang menunjukkan bahwa Tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

b. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menggunakan data panel dengan model *Fixed Effect Model* yang telah digunakan, menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.0510 > 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Tingkat pengeluaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

Hal ini dapat terjadi oleh adanya berbagai kategori pengangguran, seperti halnya kelompok pengangguran terbuka: mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bersiap-siap untuk memulai usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak punya pekerjaan. Kemiskinan tidak terpengaruh oleh pengangguran karena mayoritas pengangguran yang menganggur berpendidikan dan mampu menghidupi diri mereka sendiri; tidak semua pengangguran menjadi miskin; di antara kelompok pengangguran terbuka, sebagian bekerja di sektor tidak terorganisir dan sebagian memiliki usaha sendiri (Suripto & Subayil, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua individu yang menganggur menjadi miskin atau beberapa individu yang menganggur mendapat dukungan dari mereka yang memiliki uang yang cukup (Cahyani & Muljaningsih, 2022).

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Cahyani & Muljaningsih (2022) dan Mufidah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat kemiskinan.

c. Hubungan Tingkat Peneluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menggunakan data panel dengan model *Fixed Effect Model* yang telah digunakan, menunjukkan bahwa Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan arah hubungan positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.0181 < 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Tingkat pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Koefisien Tingkat pengeluaran yakni 0.042702, yang memiliki arti terdapat hubungan searah diantara kedua variabel. Hal ini berarti kenaikan 1% pada Tingkat pengeluaran akan meningkatkan sebesar 0.042702% pada tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.

Hal ini menggambarkan betapa rumitnya keterkaitan antara keputusan pengeluaran pemerintah dan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan. Dampak berbagai program pengeluaran/belanja pemerintah, termasuk belanja infrastruktur,

² Q'rene V. F. Supir, Josep B. Kalangi, and Steeva Y. L. Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Berkala Efisiensi* 23, no. 10 (2023): 73–84.

kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, subsidi, dan sektor swasta, terhadap kemiskinan bervariasi. Meskipun pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan lapangan kerja, manfaatnya mungkin tidak merata di wilayah pedesaan. Prospek kerja yang lebih baik dapat muncul dari investasi pendidikan, namun dampaknya memerlukan waktu. Program jaminan sosial dan layanan kesehatan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan secara langsung, namun keberhasilannya bergantung pada seberapa baik program tersebut diterapkan dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. Bantuan konsumen langsung dapat diberikan melalui subsidi pemerintah, namun efisiensi dapat menurun karena penargetan yang tidak akurat. Melibatkan sektor swasta dapat meningkatkan investasi, namun hasilnya bervariasi berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan (Prasetyo, 2015).

Merencanakan, melaksanakan, dan menilai kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah sangat penting untuk menjamin efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan, meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terlihat. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Soleh & Wahyuni (2021) yang menunjukkan pengaruh tingkat pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi Tingkat kemiskinan dengan arah positif

d. Hubungan Dana Otonomi Khusus (DOK) Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menggunakan data panel dengan model *Fixed Effect Model* yang telah digunakan, menunjukkan bahwa DOK tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.4190 > 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Otsus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

Pada dasarnya pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan alasan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka pemberian otonomi khusus kepada Papua Barat Data melalui penyaluran dana otonomi khusus tersebut. Karena alokasi dan pemanfaatan dana tersebut belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka tidak ada korelasi antara penyediaan dan pengaruhnya (Kadafi & Murtala, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemong (2023) yang menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat Daya tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.

D. Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengkaji factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat, baik itu mengurangi atau meningkat kemiskinan. berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan; PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan arah hubungan negative. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.0000 < 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Koefisien PDRB yakni -0.612444 , Hal ini berarti kenaikan 1% pada PDRB akan menurunkan sebesar 0.612444% pada tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probabilitas* sebesar $0.0510 > 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Tingkat pengeluaran tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan arah hubungan positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0181 < 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Tingkat pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.4190 > 0.05$ yang menunjukkan secara parsial variabel Otsus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

Daftar Pustaka

- A, Widarjono. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN, 2013.
- Amin, Arif, Bambang Juanda, and Wiwiek Rindayati. "Effect of Fiscal Independence and Economic Growth on Reducing Poverty and Unemployment in Indonesia." *Economics, Business, Accounting & Society Review* 2, no. 2 (2023): 97–109. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v2i2.62>.
- Asawidya, Putri Ayu. "The Effects of Economic Growth, Education, and Government Expenditure on Poverty in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 7 (2015): 1–16. <http://scholar.unand.ac.id/35384/>.
- Handayani, Liliana. "Analysis of The Influence of The Unemployment Rate and HDI on Poverty Levels in Province of Central Java." *Journal of Economic Education* 12, no. 1 (2023): 125–32.
- Harsono, Iwan, I Gusti Ayu Purnamawati, and Ida Wayan Demung. "Determinants of Economic Growth, Poverty, and Unemployment: A Path Analysis Study." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 2 (2023): 359–66. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.63986>.
- Hertzmark, Ellen, and Adolfo Chavez. "The Effect of Economic Growth on Nutrition." *Ecology of Food and Nutrition* 4, no. 4 (1976): 257–59. <https://doi.org/10.1080/03670244.1976.9990437>.
- Hidayat, Erwan Wahyu, Rosyadi, and Nurul Bariyah. "Human Development Index, Unemployment and Poverty Rate in Kalimantan Barat." *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (SATIESP 2020)*, 2020, 12–23.
- Ikhsan, Vellayati Hajad, Nodi Marefanda, Akmal Saputra, and Herizal. "The Special Autonomy Funds Are Not for Poverty Alleviation: A Lesson from Aceh's Way." *Journal of Local Government Issues* 5, no. 2 (2022): 161–75. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.21658>.
- Iskandar, Irham. "Effect Of Human Development Index Fund on Economic Growth Through A Special Autonomy." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 18, no. 1 (2017): 50. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i1.2920>.
- Kuangan, Kementerian. "Kajian Fiskal Regional." *Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau*, 2019, 1–25.
- Komarudin, Mohamad, and Mandar Oak. "Public Health Spending, Governance Quality and Poverty Alleviation." *Economics and Finance in Indonesia* 66, no. 2 (2020):

157. <https://doi.org/10.47291/efi.v66i2.751>.
- Nugroho, Danesta Febianto, Bayu Rhamdani Wicaksono, and Muhammad R Reynaldi. "Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia* 67, no. 2 (2021): 257–69. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i2.811>.
- Pattinasarany, Gregorius D.v., Ihsan Haerudin, Paramagarjito B. Irtanto, and Lilik Iswanto. *Dana Otonomi Khusus 2022–2041*, 2022.
- Setiawan, Deni, Khalida Ulfa, and Titin Purwaningsih. "Poor Aceh: The Impact of Special Autonomy As Effort Poverty Reduction in Aceh." *DIA Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 18, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.30996/dia.v18i2.3654>.
- Stevens, Lonnie K., and David N. Sessions. "The Relationship between Poverty and Economic Growth Revisited." *Journal of Income Distribution* 17, no. 1 (2008): 5–20.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supir, Q'rene V. F., Josep B. Kalangi, and Steeva Y. L. Tumangkeng. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Berkala Efisiensi* 23, no. 10 (2023): 73–84.
- Taruno, Hendrawan Toni. "Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018." *The Indonesian Journal of Planning and Development* 4, no. 2 (2019): 49–56. <https://doi.org/10.14710/ijpd.4.2.49-56>.
- The World Bank Office Jakarta. "Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *The World Bank* 112, no. 483 (2017): 211–12.
- Widyastuti, Ariyani. "An Analysis of Strategies for Increasing Economic Growth as an Effort to Reduce Poverty and Unemployment through Regional Financial Management Optimization" 12, no. 1 (2023): 1–14.